

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 37 TAHUN 2007 PASAL 2 TENTANG UPAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (Perbandingan Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar/Primer di Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Guntung Kota Bontang)

Hasni Yasin¹

Abstrak

Artikel ini menyoroti tentang Implementasi Peraturan Walikota Bontang yang memfokuskan pada perbandingan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung dan Puskesmas Pembantu Bontang Kuala, dan artikel ini berargumentasi bahwa Implementasi Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 Pasal 2 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum semua diimplementasikan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung seperti laboratorium sederhana, penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga, sementara di Puskesmas Pembantu Bontang Kuala meliputi laboratorium sederhana, pemeriksaan dan pengobatan gigi, imunisasi, penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Peraturan Walikota, Pelayanan Kesehatan*

Pendahuluan

Arah pembangunan Kota Bontang dibidang kesehatan mengarah pada tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang RI. No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 3 (2009:5), yang menyatakan bahwa: Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Bagi masyarakat Kota Bontang, kesehatan adalah kebutuhan dasar dan modal utama untuk hidup, karena setiap manusia berhak untuk hidup dan memiliki kesehatan yang layak. Upaya pemerintah terhadap pelayanan kesehatan, diantaranya meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Salah satu

¹ Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yasinhasni@ymail.com

sarana kesehatan yang ada di Kota Bontang adalah Puskesmas Pembantu yang berada di tiap-tiap Kecamatan. Fungsi dari Puskesmas Pembantu sebagai penunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 pasal 2 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan Puskesmas Pembantu Guntung dan Bontang Kuala? Kendala apa sajakah yang dihadapi Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung dan Kelurahan Bontang Kuala dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 pasal 2 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Puskesmas Pembantu?

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Bontang No 37 tahun 2007 pasal 2 tentang pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan Puskesmas Pembantu di Kelurahan Guntung dan Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Puskesmas Pembantu dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 pasal 2 tentang pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan puskesmas pembantu di Kelurahan Guntung dan Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang.

Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi puskesmas pembantu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Guntung. Secara praktis adalah sebagai bahan referensi bagi Pemerintah Kota Bontang, sebagai tahap evaluasi agar pelayanan kesehatan pada masyarakat bisa lebih di tingkatkan demi terselenggaranya pelayanan kesehatan secara menyeluruh pada masyarakat Kota Bontang.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi kebijakan

Pada dasarnya Implementasi Peraturan Walikota Bontang No. 37 Tahun 2007 merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kebijakan. Untuk itulah peneliti menggunakan teori-teori implementasi kebijakan sebagai kerangka pikir dalam memahami makna dari variabel tersebut. Dan agar dapat dimaknai dengan benar oleh setiap orang yang menggunakan penelitian ini, maka peneliti berupaya menjabarkannya dengan melakukan makna dari setiap variabel yang dimaksud.

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Hakikat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang

terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Menurut Anderson (dalam Islami, 2002:17) kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok guna memecahkan masalah. Laswell dan Kaplan (dalam Lubis, 2007:9) kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.

Dari beberapa penjelasan definisi di atas, menurut Horn (dalam Wahab 1997:65) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan dari suatu keputusan kebijakan yang mengarah kepada cara-cara bertindak sesuai dengan amanat, aturan atau ketentuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Peraturan Walikota adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur. Peraturan Walikota dikeluarkan atas persetujuan Walikota.

Penyelenggara pelayanan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Menurut Menurut SKN (2004:85), pelaku penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Masyarakat, 2). Pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten/Kota, 3). Badan legislatif meliputi badan legislatif di pusat maupun daerah, 4). Badan yudikatif berperan menegakkan pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan.

Dari uraian di atas bahwa Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Implementasi Peraturan Walikota Tentang Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Implementasi merupakan suatu tahap dalam proses kebijakan publik dimana proses tersebut melalui beberapa tahapan implementasi sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Walikota Bontang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat merupakan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bontang. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penerima/masyarakat dikatakan berhasil apabila implementasi pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan (Pelayanan Tingkat Dasar) dan juga mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif yang berhubungan dengan sejauhmana berjalannya pelaksanaan Peraturan Walikota Bontang No 37 pasal 2 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung dan Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang.

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.

Menurut Miles dan Huberman 2007:20 menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 1). Pengumpulan Data (*Data Collection*), 2). Reduksi Data (*Data Reduction*), 3). Penyajian Data (*Data Display*), 4). Verifikasi Data (*Data Verification*)

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Implementasi Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 pasal 2 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat ada beberapa indikator penting dalam pelaksanaan peraturan tersebut dalam hal ruang lingkup pelayanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas Pembantu Guntung dan Puskesmas Pembantu Bontang Kuala yang meliputi:

Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung

a. Pemeriksaan Fisik

Pendekatan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui Puskesmas Pembantu dilakukan oleh dokter maupun petugas medis lainnya. Pemeriksaan fisik yang dimaksudkan disini adalah upaya dalam meningkatkan kesehatan untuk mengetahui keadaan fisik atau kondisi pasien secara umum dan sistem organ yang spesifik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan oleh tenaga medis untuk memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit.

Dalam pemeriksaan fisik, tenaga medis menanyakan dahulu kondisi fisik yang dikeluhkan oleh pasien kemudian tim medis memeriksa lebih lanjut lagi kondisi keseluruhan pasien tersebut.

Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bontang No 37 tahun 2007 tentang pelayanan kesehatan masyarakat dalam pelayanan pemeriksaan fisik di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung sudah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Walikota Bontang.

b. Laboratorium Sederhana

Pelayanan laboratorium sederhana merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosa dini maupun monitoring terapi dalam rangka penyembuhan yang dilakukan baik secara aktif maupun pasif yang ada di Kota Bontang.

Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung tidak dilengkapi dengan laboratorium sederhana untuk mendiagnosa jenis penyakit pasien. Sehingga pasien yang mengadakan uji laboratorium, harus dirujuk ke Puskesmas untuk mengetahui jenis penyakitnya.

Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Bontang belum sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Pembantu sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.

c. Tindakan Medis Ringan

Bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat salah satunya adalah tindakan medis ringan. Ini dimaksudkan untuk memudahkan setiap masyarakat untuk melakukan tindakan medis ringan di Puskesmas Pembantu tiap Kelurahan. Sehingga penanganannya lebih cepat teratasi.

Pelayanan medis ringan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Pembantu ditangani oleh tenaga medis secara langsung. Jenis medis ringan yang ditangani oleh Pihak Puskesmas Pembantu Guntung seperti luka jahit dan ganti perban. Dengan keberadaan Puskesmas Pembantu di Kelurahan Guntung dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tindakan medis ringan.

Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung telah melayani tindakan medis ringan dengan maksimal hal ini sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, dalam bentuk pelayanan tindakan medis ringan.

d. Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi

Pelayanan kesehatan pemeriksaan dan pengobatan gigi ini hanya berlaku pada satu unit instansi kesehatan saja. Jenis pelayanan kesehatan dasar itu sendiri merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik untuk

keperluan observasi maupun pengobatan yang dilakukan pada pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini tim medis.

Dalam pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gigi yang dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Guntung, pasien yang datang berobat dan mempunyai keluhan dengan keadaan sakit, tenaga medis yang ahli dalam pelayanan tersebut memberikan nasehat atau arahan agar gigi yang dalam keadaan akut tersebut agar bisa di dipertahankan atau menambahkan zat kitin pada gigi pasien (penambalan gigi).

Hal ini berarti peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan pengobatan dan pemeriksaan gigi sudah dilaksanakan oleh Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung. Ini merupakan wujud dari peningkatan pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bontang guna memudahkan masyarakat Guntung dalam mendapatkan pengobatan dan pemeriksaan gigi di Puskesmas Pembantu.

e. Pemeriksaan Ibu hamil/nifas/menyusui/bayi balita (KIA)

Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui/bayi balita adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap ibu hamil beserta janinnya secara berkala untuk mengawasi kondisi kesehatan ibu serta pertumbuhan dan perkembangan janin guna persiapan persalinannya, masa nifas, pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan kembalinya kesehatan reproduksi.

Pelayanan KIA seperti pemeriksaan Ibu hamil, tenaga medis memberikan pelayanan sejak pemeriksaan awal hingga akhir kehamilan. Puskesmas Pembantu dalam memberikan pelayanan kepada Ibu hamil telah melakukan tindakan ketika pasien mengalami keluhan dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan pengobatan jika keluhan yang disampaikan oleh Ibu hamil dianggap serius.

Untuk persalinan bagi Ibu hamil masih terkendala dengan alat transportasi seperti ambulance yang belum disediakan oleh pihak Puskesmas Pembantu tersebut. Lokasi permukiman warga dan RS yang menempuh waktu yang cukup lama sehingga masyarakat yang melakukan persalinan ke bidan praktek dan biayanya pun cukup mahal. Untuk pelayanan imunisasi bagi bayi balita dapat dijadwalkan dalam pemberian imunisasi pada anak sehingga masyarakat dapat mengetahui waktunya untuk imunisasi.

f. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Dalam mempercepat tercapainya penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran diperlukan perpaduan keluarga berencana (KB) yang juga merupakan salah satu dari program Puskesmas Pembantu di Kota Bontang.

Pelayanan keluarga berencana (KB) di Puskesmas Pembantu Guntung telah melakukan pengarahan tentang jarak waktu kehamilan bagi warga Guntung dan sosialisasi guna untuk menekan angka kelahiran bayi dan angka kematian bayi serta diharapkan tidak ada lagi kehamilan yang tidak diinginkan sehingga angka aborsi akan berkurang.

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk merupakan salah satu kewajiban pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan pembangunan. Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung telah melayani pelayanan KB bagi masyarakat Guntung. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

g. Pemberian Obat-Obatan Sesuai Ketentuan

Pemberian obat-obatan sesuai dengan ketentuan merupakan ketentuan dalam memenuhi kebutuhan obat. Penyaluran obat telah diatur pula jenis, biaya dan dosis serta pemanfaatannya di Puskesmas Pembantu maupun rumah sakit.

Secara keseluruhan obat yang ada di Puskesmas Pembantu adalah obat generik dan jika obat yang diberikan pihak Puskesmas Pembantu kepada pasien itu habis, pasien disarankan untuk dapat kembali cek up ke Puskesmas Pembantu Guntung. Obat-obat tersebut tidak dipungut biaya bagi masyarakat yang terdaftar sebagai anggota JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah) Kota Bontang.

Jenis penyakit yang banyak ditangani oleh pihak Puskesmas Pembantu adalah jenis penyakit Saluran Pernafasan (ISPA). Ini disebabkan oleh polusi udara seperti asap kendaraan, asap perusahaan, perilaku hidup masyarakat yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, membangun rumah yang tidak memiliki sirkulasi udara yang cukup dan lain-lain.

Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung telah melayani pemberian obat-obatan sesuai dengan ketentuan kepada setiap pasien. Hal ini berarti peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diterapkan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung.

h. Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Keluarga

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Salah satu program Puskesmas yaitu dibidang promosi kesehatan (Promkes) yang dapat menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga kepada masyarakat.

Puskesmas Pembantu sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di wilayah yang lebih kecil hanya sebagai pelayanan pengobatan sehingga pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga diselenggarakan oleh Puskesmas.

Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung belum melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga. Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 melalui

penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat belum terselenggara dengan baik di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung. Hal ini disebabkan penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas sebagai program utama.

Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala

a. Pemeriksaan Fisik

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu Bontang Kuala melalui pemeriksaan fisik merupakan peningkatan kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik atau kondisi pasien secara umum dan sistem organ yang spesifik.

Mengenai pelayanan yang ada di Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala, tenaga medis (dokter dan perawat) melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan keluhan pasien.

Pemeriksaan fisik yang pertama kali dilakukan yaitu penimbangan pada pasien dan menanyakan keluhan pasien tersebut. Selanjutnya tenaga medis (dokter) memeriksa lebih lanjut tentang keluhan yang dialami pasien.

Hal ini berarti Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan sudah diterapkan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala.

b. Laboratorium Sederhana

Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala adalah sarana kesehatan yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kesehatan sebagai solusi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Puskesmas Pembantu Bontang Kuala tidak dilengkapi dengan laboratorium untuk mendiagnosa jenis penyakit pasien. Jenis penyakit pasien yang perlu di uji laboratorium harus dirujuk ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bontang.

Sehingga dalam peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum diterapkan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala

c. Tindakan Medis Ringan

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kelurahan Bontang Kuala, pelayanan tindakan medis ringan merupakan salah satu tugas dan fungsi Puskesmas Pembantu dalam memberikan kemudahan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Pelayanan tindakan medis ringan di Puskesmas Pembantu Bontang Kuala sifatnya situasional. Artinya bahwa dokter maupun perawat bekerjasama dalam menangani setiap pasien yang melakukan medis ringan di Puskesmas Pembantu tersebut.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tenaga medis telah memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau sesuai dengan tuntutan masyarakat, hal ini juga dibuktikan dengan petugas medis dalam pelayanan medis ringan penanganannya lebih cepat dengan tujuan untuk melakukan pertolongan dalam pengobatan dan biayanya pun lebih murah.

Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala telah melayani tindakan medis ringan seperti luka jahit maupun ganti perban. Hal ini berarti peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan telah diterapkan di Puskesmas Pembantu Bontang Kuala.

d. Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi

Pelayanan kesehatan dasar pemeriksaan dan pengobatan gigi di Puskesmas Pembantu merupakan indikator penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar yang lebih optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai pelayanan kesehatan, Puskesmas Pembantu Bontang Kuala tidak melayani pemeriksaan dan pengobatan gigi. Hal ini disebabkan kurangnya daya listrik yang ada di Puskesmas Pembantu tersebut sehingga tidak melayani pemeriksaan dan pengobatan gigi.

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 belum dilaksanakan oleh Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala.

e. Pemeriksaan Ibu hamil/nifas/menyusui/bayi balita (KIA)

Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, pelayanan kesehatan untuk Ibu hamil/nifas/menyusui sangatlah penting dipantau kesehatannya agar keadaan janin yang ada didalam rahim si Ibu tersebut dapat dilihat pertumbuhannya apakah baik atau mengalami suatu masalah. Dengan demikian bayi yang lahir dari Ibu yang sehat dan selalu memantau kondisinya kemungkinan besar bayi itu juga akan lahir dengan baik dan sehat.

Pelayanan kesehatan untuk balita yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak balita yang meliputi imunisasi. Hal ini sangatlah penting untuk bayi dan balita agar kekebalan tubuh menjadi tahan atas berbagai macam penyakit.

Dari masyarakat Bontang Kuala sendiri sudah dapat mengerti pentingnya pertumbuhan dan perkembangan janin dengan memeriksakan kandungannya ke Puskesmas Pembantu, RS maupun bidan praktek.

Untuk pelayanan imunisasi seperti campak maupun polio, Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala masih terkendala dengan kurangnya daya tampung listrik untuk menyimpan obat-obatan imunisasi.

f. Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesehatan Ibu dan anak. Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas Pembantu Bontang Kuala memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menyadari bahwa program KB bagi masyarakat Bontang Kuala dapat memberikan kontribusi penurunan angka kematian ibu dan anak, maka pihak Puskesmas Pembantu dapat menyelenggarakan sosialisasi standar pelayanan KB bagi masyarakat dan memberikan pembekalan kesehatan kepada petugas kesehatan yang mengabdikan di Puskesmas Pembantu. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi angka kelahiran dan meningkatkan kemampuan petugas pengelola program KB dalam memberikan pelayanan KB kepada warga di wilayah kerja.

Hal ini berarti Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan sudah diterapkan di Puskesmas Pembantu Bontang Kuala.

g. Pemberian Obat-obatan Sesuai Ketentuan

Akses obat-obatan merupakan kewajiban bagi pemerintah dan instansi pelayanan kesehatan baik publik maupun swasta.

Pemberian obat kepada pasien sudah memediasi prosedur dengan baik dan obat-obatan yang ada di Puskesmas Pembantu adalah obat-obat generik. Obat yang diberikan kepada setiap pasien, sesuai dengan keluhan penyakit yang pasien tersebut derita.

Untuk sistem pembiayaan masyarakat Kota Bontang digratiskan berobat melalui pelayanan di Puskesmas Pembantu dengan syarat mereka harus mempunyai kartu jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) untuk mendapatkan kartu jamkesmas tidaklah sulit, cukup dengan membawa fotocopy KTP dan Kartu keluarga serta pengantar dari RT kemudian dibawa ke kantor Dinas Kesehatan.

Jenis penyakit yang ditangani oleh pihak Puskesmas Pembantu adalah penyakit Influenza. Disebabkan karena kondisi cuaca di Kelurahan Bontang Kuala yang berubah-ubah, ketahanan tubuh masyarakat yang masih rendah dan kebiasaan masyarakat yang melaut selama sehari-hari tanpa memperdulikan cuaca.

Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala telah melayani pemberian obat-obatan sesuai dengan ketentuan. Hal ini berarti peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan telah diterapkan di Puskesmas Pembantu Bontang Kuala.

h. Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Keluarga

Derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bersih. Untuk mencapai derajat kesehatan ditengah-tengah kehidupan

masyarakat maka akan terlihat apabila masyarakat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dalam mendukung pembangunan yang ada di Kota Bontang, peran Puskesmas Pembantu dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga sangat penting.

Puskesmas Pembantu Bontang Kuala belum melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga. Penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas Induk dibidang promkes. Puskesmas Pembantu hanya melayani pengobatan saja.

Dengan demikian Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 melalui penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat belum dilaksanakan dengan baik di Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala.

Dari uraian di atas pelaksanaan Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diterapkan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung meliputi pelayanan pemeriksaan fisik, tindakan medis ringan, pemeriksaan dan pengobatan gigi, pemeriksaan Ibu hamil/nifas/menyusui/bayi balita, pelayanan KB dan pemberian obat-obatan sesuai dengan ketentuan sedangkan yang telah diterapkan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala meliputi pemeriksaan fisik, tindakan medis ringan, pemeriksaan Ibu hamil/nifas/menyusui/bayi balita, pelayanan KB dan pemberian obat-obatan sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang belum dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung meliputi laboratorium sederhana serta penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga sedangkan yang belum dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala meliputi laboratorium sederhana, pemeriksaan dan pengobatan gigi serta penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang telah diterapkan oleh Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung dan Puskesmas Pembantu Bontang Kuala meliputi pemeriksaan fisik, tindakan medis ringan, pemeriksaan dan pengobatan gigi, pemeriksaan ibu hami/nifas/menyusui/bayi balita, pelayanan KB dan pemberian obat-obatan sesuai dengan ketentuan.

Kendala yang dihadapi Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung dan Puskesmas Pembantu Bontang Kuala.

Ketidak tersediaan ambulans.

Kebutuhan akan ambulans gawat darurat menjadi sangat penting sebagai pilar utama dalam rantai pelayanan kesehatan. Tujuan dari pelayanan emergency ini adalah untuk memberikan pertolongan pertama bagi pasien seperti: kematian,

menanggulangi korban kecelakaan maupun persalinan bagi Ibu hamil yang langsung membutuhkan tindakan.

Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, prasarana kesehatan sangat mendukung kelancaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan emergency sangat dibutuhkan oleh masyarakat sewaktu-waktu dalam penanganan gawat darurat seperti korban kecelakaan maupun kematian.

Kendala yang dihadapi oleh Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung dan Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala, tidak tersedianya ambulans untuk penanganan gawat darurat. Sehingga pasien yang semestinya dirujuk ke rumah sakit terkendala dengan tidak adanya ambulans sebagai pelayanan emergency.

Kurangnya daya listrik.

Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sangat mendukung dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti kebutuhan akan listrik yang mempengaruhi kelancaran dalam pelayanan kesehatan. Akibat kurangnya energi listrik yang ada di Puskesmas Pembantu Bontang Kuala mengakibatkan pelayanan pengobatan dan pemeriksaan gigi belum maksimal. Sehingga masyarakat yang ingin melakukan pengobatan gigi harus ke RS.

Kurangnya kemampuan energi listrik yang tersedia di Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala kurang mendukung berbagai kegiatan operasional Puskesmas Pembantu. Sehingga pelayanan imunisasi bagi bayi balita serta pengobatan dan pemeriksaan gigi belum efektif. Dengan dukungan fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas Pembantu Bontang Kuala dapat bekerja secara optimal demi kepentingan masyarakat.

Terbatasnya alat kesehatan (Pengontrol asam urat, kolesterol dan kadar gula)

Dengan terbatasnya alat kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas Pembantu Guntung dan Puskesmas Pembantu Bontang Kuala, menyebabkan pasien harus dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk mendiagnosa lebih jelas jenis penyakitnya.

Terbatasnya alat kesehatan seperti alat pengontrol kadar gula, asam urat maupun kolesterol di Puskesmas Pembantu Guntung dan Puskesmas Pembantu Bontang Kuala menyebabkan pelayanan menjadi belum efektif.

Sehingga pasien yang mengontrol jenis penyakitnya harus dirujuk ke Puskesmas untuk mengetahui jenis penyakit tersebut.

Penutup

Implementasi Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 tentang upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diterapkan di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung dan Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala :

Pelayanan pemeriksaan fisik di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung dan Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tim medis telah memeriksa kondisi fisik pasien sesuai dengan keluhan yang dialami oleh pasien.

Pelayanan laboratorium sedehana belum berjalan dengan baik di Puskesmas Pembantu Guntung dan Puskesmas Pembantu Bontang Kuala. Hal ini dikarenakan terbatasnya alat kesehatan seperti mendeteksi jenis penyakit, urine dan faeces untuk Puskesmas pembantu sehingga pasien harus dirujuk.

Tindakan medis ringan yang telah ditangani oleh pihak Puskesmas Pembantu meliputi luka jahit, ganti perban, otitis media akut telah berjalan dengan efektif.

Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gigi di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung telah berjalan dengan maksimal. Dimana pasien yang datang berobat dalam keadaan akut, tim medis memberikan motifasi kepada pasien agar bisa di obati saja. Sementara pelaksanaan pemeriksaan dan pengobatan gigi di Kelurahan Bontang Kuala belum efektif disebabkan kurangnya daya listrik sehingga masyarakat yang melakukan pengobatan gigi harus ke Puskesmas atau RS.

Untuk pelayanan pemeriksaan Ibu hamil/nifas/menyusui/bayi balita di Puskesmas Kelurahan Guntung dan Puskesmas Pembantu Kelurahan Bontang Kuala sudah berjalan dengan efektif. Tetapi untuk pelayanan bayi balita dalam pemberian imunisasi belum dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Bontang Kuala disebabkan kurangnya daya listrik untuk menampung obat-obatan imunisasi.

Pelayanan KB di Puskesmas Pembantu Kelurahan Guntung telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengaturan jarak kehamilan. Sementara pelayanan KB di Puskesmas Pembantu Bontang Kuala belum berjalan dengan efektif disebabkan usia tenaga medis yang masih muda sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pelayanan KB.

Pemberian obat-obat tersebut diberikan kepada pasien sesuai dengan jenis penyakitnya. Dengan adanya program pemerintah Kota Bontang dalam sistem pembiayaan kesehatan, masyarakat yang terdaftar sebagai anggota JAMKESDA tidak dipungut biaya untuk mendapatkan obat di Puskesmas Pembantu.

Penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga belum diselenggarakan di Puskesmas Pembantu Guntung dan Puskesmas Pembantu Bontang Kuala. Hal ini disebabkan Puskesmas Pembantu hanya sebagai pelayanan pengobatan sementara pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kesehatan keluarga merupakan program dari Puskesmas.

Dalam pelaksanaan Implementasi tersebut memiliki kendala-kendala yakni, ketidaktersediaan ambulans, kurangnya daya listrik dan kurangnya alat kesehatan.

Daftar Pustaka

- Azwar. 1996. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Jakarta : Banacipta
- Andriyana. Pelayanan Jasa Kesehatan Puskesmas Loktuan di Kecamatan Bontang Utara, 2004 (Skripsi Fisipol Universitas Mulawarman).
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung
- Evithasari, Lestari. Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terapung Pada Masyarakat Pesisir Mahakam di Kampung Muara Jawaq Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat (SKRIPSI)
- Hasdam, Sofyan. 2006. *Bontang Bebas Kemiskinan 2020*, Pemerintah Kota Bontang
- Islami, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Lubis, Solly.M. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung : Mandar Maju
- Moenir Ahmad. 2001. *Manajemen Pelayanan*. Angkasa, Bandung
- Moleong, Lexy J, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Miles Matthew B dan Huberman A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia : Jakarta
- Noor Fahrudin, Implementasi Peraturan Walikota Bontang No 37 Tahun 2007 Tentang Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui dokter keluarga di Kelurahan Bontang Lestari (SKRIPSI)
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nasrul Effendy. 1998. *Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, EGC : Jakarta
- Notoatmijo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Edisi Revisi, Rineka Cipta : Jakarta
- Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, PMN : Surabaya
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Saryono. 2008. *Metode Penelitian Kesehatan*, Mitra Cendikia Press : Jogjakarta
- Sinambela, Lijan.P.2006. *Reformasi Pelayanan Publik* : PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Suhartono, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Kurniawan, Agung. 2005. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung
- Wiku, Adi Sasmito. 2007. *Sistem Kesehatan*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Wasistiyono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia : Bandung
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Press : Yogyakarta